



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI
HASIL PEMBICARAAN TK.I/PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI
Tanggal 19 September 2024**

**Oleh:
Ketua Badan Anggaran DPR RI
MH. Said Abdullah
Nomor Anggota : A-224**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I/PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025**

Kamis, 19 September 2024

Bismillahirrahmannirrahim

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastyastu, Namu Buddhaya, dan
Salam Kebajikan**

**Yth. Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan,
Yth. Saudari Menteri Keuangan RI,
Yth. Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,
Yth. Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Proses Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2025 di Badan Anggaran dimulai dengan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2024, dan pembentukan Panja-panja yaitu: 1) Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; 2) Panja Belanja Pemerintah Pusat; 3) Panja Transfer ke Daerah; dan 4) Panja Draf RUU. Panja-panja tersebut telah melakukan pembahasan pada tanggal 2 September - 11 September 2024, dalam pembahasan tersebut dibentuk Tim Perumus Panja-panja.

Selanjutnya dialokasikan waktu di Komisi-komisi untuk melakukan pembahasan dengan mitra kerjanya pada tanggal 27 Agustus - 10 September 2024.

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka membahas dan menetapkan Postur Sementara RAPBN TA.2025. Selanjutnya Pimpinan Badan Anggaran telah melakukan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR pada tanggal 13 September 2024. Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU APBN TA.2025 dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Berikut kesepakatan dalam Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU tentang APBN TA 2025 di Badan Anggaran DPR RI:

No	Asumsi Makro	RAPBN 2025	Konsep RPJMN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2
2	Laju Inflasi (%)	2,5	2,5
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	16.100	16.000
4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,1	7,0
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US\$/Barel)	82	82
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	600	605
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.005	1.005

Sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah menyangkut target asumsi ekonomi makro diatas antara lain;

- 1) Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangat besar. Kesuksesan pemerintah menjaga inflasi rendah selama ini patut kita apresiasi. Namun kewaspadaan perlu kita jaga terhadap gejolak harga pangan dan energi yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.
- 2) Badan Anggaran DPR mendorong tingkat bunga SBN 10 tahun lebih rendah dari usulan pemerintah. Terlebih lagi target tingkat bunga SBN tahun 2024 ini lebih rendah dilevel 6,7 persen dibandingkan tahun depan. Langkah ini untuk mengantisipasi mahalnya biaya dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintahan baru.
- 3) Pemerintah akhirnya menyepakati usulan Komisi VII DPR dan Badan Anggaran DPR untuk bisa memenuhi target lifting minyak bumi lebih tinggi dari rencana awal. Meskipun target ini tidak mudah, namun langkah itu perlu di upayakan oleh pemerintah untuk menambah PNBPN pada tahun depan, serta mengurangi kebutuhan impor minyak bumi yang semakin besar.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang mulia,

RAPBN 2025 kita abdikan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan sejumlah target indikator kesejahteraan. Hal ini sebagai ukuran kinerja bagi sukses tidaknya pelaksanaan pembangunan manusia kedepan, antara lain;

No	Sasaran dan Indikator Pembangunan	RAPBN 2025	Konsep RPJMN
1	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	7,0 - 8,0
2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0	0
3	Gini Rasio (indeks)	0,379 – 0,382	0,379 – 0,382
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5,0	4,5 - 5,0
5	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,56
6	Nilai Tukar Petani (indeks)	115 -120	115 -120
7	Nilai Tukar Nelayan (indeks)	105 -108	105 -108

Atas sejumlah indikator kesejahteraan diatas, Badan Anggaran DPR meminta pemerintah mencermati beberapa hal penting antara lain;

- 1) Pemerintah perlu mewaspadai gelombang pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi sepanjang Januari-Juni 2024 sebanyak 32.064 pekerja, dan hampir separuhnya di sektor tekstil. Tren pengangguran juga meningkat pada kelompok pekerja paruh, dari tahun lalu sebesar 6,91 persen menjadi 8,52 persen di Februari 2024.
- 2) Data BPS per Februari 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan pada posisi 9,03 persen. Terdapat gap tingkat kemiskinan yang cukup tinggi antara desa sebesar 11,79 persen dan kota sebesar 7,09 persen. Pemerintah perlu prioritas penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih intensif. Langkah ini bisa mengerem laju urbanisasi, sekaligus mendorong program kemandirian pangan nasional.
- 3) Indeks Modal Manusia (IMM) merupakan penyesuaian terhadap standar internasional dalam mengukur pembangunan sumber daya manusia dengan skala 0-1. Saat ini IMM Indonesia di level 0,54 di urutan 96 dari 173 negara. Sebagai perbandingan, IMM negara negara maju skalanya 0,7-0,8. Kita juga perlu mengejar ketertinggalan dengan negara negara peer, seperti Malaysia yang berada di 0,61, Thailand 0,61, Vietnam 0,69.
- 4) NTP pada Agustus 2024 mencapai 119,85 meningkat dari bulan sebelumnya di level 119,61. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus atas penurunan NTP disejumlah daerah yang berada di bawah 100, seperti Bali hanya 98,3, Maluku 99,9, dan Papua Barat Daya 98,75.

Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Atas dorongan Badan Anggaran DPR RI, Pemerintah menyepakati untuk meningkatkan target pendapatan negara surplus Rp8,26 triliun dari rencana awal, yang bersumber dari peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sehingga, Pendapatan Negara dalam APBN TA 2025 disepakati sebesar:

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	RAPBN 2025	Kesepakatan
A. Penerimaan Pajak	2.189.307,2	2.189.307,2
B. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	301.604,4	301.604,4
C. Penerimaan Negara Bukan Pajak	505.377,6	513.635,1
D. Penerimaan Hibah	581,1	581,1
Pendapatan Negara	2.996.870,2	3.005.127,7

Penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung utama pendapatan negara. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak dan tata kelola perpajakan harus semakin lebih baik. Dengan dukungan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah kedepan hendaknya lebih inovatif dalam membangun postur perpajakan, agar akseleratif dengan pertumbuhan ekonomi, namun tetap menjaga iklim investasi, serta kolaborasi dalam core revenue system sebagai sinergi pusat dan daerah.

Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat untuk menaikkan PNBPN. Arah kebijakan untuk mencapai target PNBPN, yakni dengan memperbaiki tata kelola penerimaan sumber daya alam, dan mendorong adanya nilai tambah, namun memegang prinsip kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan deviden BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, peran BUMN sebagai *agent of development*, persepsi investor, serta regulasi dan covenant dengan perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah juga menyepakati postur belanja negara pada tahun 2025, sebagaimana yang tertuang dalam uraian dibawah ini

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	RAPBN	Kesepakatan
A. Belanja K/L	976.788,0	1.160.085,0
B. Belanja Non K/L	1.716.396,2	1.541.356,6
1. Program Pengelolaan Utang	552.854,3	552.854,3
2. Program Pengelolaan Hibah	202,7	202,7
3. Program Pengelolaan Subsidi	309.052,1	307.931,9
4. Program Pengelolaan Belanja Lainnya	665.147,7	491.228,3
5. Program Pengelolaan Transaksi Khusus	189.139,5	189.139,5
C. Transfer ke Daerah	919.872,1	919.872,1
Belanja Negara	3.613.056,3	3.621.313,7

Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati penambahan alokasi belanja negara untuk memberikan dukungan fiskal kepada program program Presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto. Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran, khususnya pada Belanja K/L dalam rangka menopang sejumlah Program Quick Win Presiden terpilih.

Sejumlah Program Quick Win pada pos belanja K/L antara lain;

- 1) Program Makan Siang Bergizi Gratis dengan alokasi anggaran Rp. 71 triliun,
- 2) Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan screening penyakit katastropik dengan dukungan anggaran Rp. 3,2 triliun,
- 3) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Daerah, dengan meningkatkan rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana dan prasarana, serta alat kesehatannya dengan anggaran Rp. 1,8 triliun,
- 4) Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebelar, dan MCK dengan alokasi anggaran Rp 20 triliun,
- 5) Membangun Sekolah Unggulan Terintegrasi dengan anggaran Rp. 4 triliun,
- 6) Membangun Lumbung pangan nasional, Daerah dan Desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan cetak sawah baru 150.000 hektar, serta dukungan sarana prasarana pendukung dengan anggaran Rp. 15 triliun.

Kita harapkan Program Quick Win Presiden terpilih mempercepat peningkatan kualitas SDM yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara negara peer. Kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif.

Dalam rangka memberikan dukungan anggaran atas komposisi kabinet yang baru, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah saat ini sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran K/L yang baru, sebab hal itu kewenangan konstitusional Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menyusun jumlah K/L dalam pemerintahannya.

Adapun alokasi belanja subsidi energi untuk rakyat lebih rendah dari usulan pemerintah, semula Rp. 204.5 triliun menjadi Rp. 203.4 triliun dikarenakan asumsi kurs rupiah terhadap US\$ lebih rendah dari usulan pemerintah, dari Rp. 16.100/US\$ menjadi Rp. 16.000/US\$.

Untuk menjalankan kewajiban konstitusional, Badan Anggaran DPR mengalokasikan belanja pendidikan sebesar Rp. 724.26 triliun atau 20,0 persen dari total belanja negara sebesar Rp. 3.621.31 triliun. Kita harapkan jalannya pendidikan lebih inklusif. Kita harus akhiri anak anak masa depan bangsa putus sekolah, atau kuliah karena persoalan biaya pendidikan.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Anggaran TKD tahun 2025 kami sepakati bersama dengan Pemerintah sebesar Rp919.872,11 miliar, yang terdiri dari:

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	RAPBN	KESEPAKATAN
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	192.281,74	192.281,74
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	446.633,81	446.633,81
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	185.240,96	185.240,96
D. Dana Otonomi Khusus	17.515,60	17.515,60
E. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1.200,00	1.200,00
F. Dana Desa	71.000,00	71.000,00
G. Dana Insentif Fiskal	6.000,00	6.000,00
Total Transfer Ke Daerah	919.872,11	919.872,11

Beberapa kebijakan strategis menyangkut TKDD yang Badan Anggaran DPR sepakati bersama pemerintah antara lain:

- 1) Kegiatan pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas yang berasal dari DAK Fisik dialihkan dari ke Pusat (Kementerian PUPR) agar menggunakan data sekolah/kelas hasil penilaian Bappenas dan Kemendikbud atas usulan daerah pada aplikasi KRISNA DAK Fisik.
- 2) Penggunaan DAU untuk PPPK harus di hitung secara lebih akurat guna meningkatkan efektifitas belanja daerah, dan dapat dilakukan pergeseran ke DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (block grant).

- 3) Dana Desa dialokasikan dengan memperhatikan kinerja pengelolaan, capaian target dan jumlah penduduk desa untuk mendorong peningkatan kemandirian Desa dan pelayanan publik desa.
- 4) Dana Otsus se kawasan Papua yang diterima dari 1,25 persen yang berasal plafon DAU harus memastikan kebijakan mandatori dengan alokasi 30 persen untuk pendidikan dan 20 persen untuk kesehatan rakyat se kawasan Papua.

Sidang Dewan yang terhormat,

Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati besaran defisit APBN 2025 sebesar Rp616,19 triliun (2,53 persen terhadap PDB, dengan perkiraan PDB nominal sebesar Rp24.316,5 triliun).

Untuk menopang kebijakan defisit APBN 2025, Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Pemerintah menyepakati kebutuhan pembiayaan tahun 2025 yang meliputi:

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	RAPBN	RESEPTASIS 2025
Pembiayaan Utang	775.867,5	775.867,5
1. SBN Netto	642.562,0	642.562,0
2. Pinjaman Netto	133.305,4	133.305,4
Pembiayaan Non Utang	(159.681,4)	(159.681,4)
1. Pembiayaan Investasi	(154.501,3)	(154.501,3)
2. Pemberian Pinjaman	(5.442,1)	(5.442,1)
3. Kewajiban Penjaminan	-	-
4. Pembiayaan Lainnya	262,0	262,0
Pembiayaan Anggaran	616.186,1	616.186,1

Dalam Pembiayaan RAPBN TA 2025, Badan Anggaran memberikan catatan yaitu:

1. DPR menyetujui usulan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai *underlying asset* penerbitan SBSN T.A. 2025 sebesar Rp384.791,1 miliar;
2. Alokasi PMN yang disetujui oleh Badan Anggaran untuk diberikan kepada BUMN, akan dilakukan pendalaman di Komisi XI, dimulai kuartal I Tahun 2025.

Berikut ini kami sampaikan postur APBN TA 2025

POSTUR APBN TA 2025
(miliar rupiah)

Uraian	2025		
	RAPBN	APBN	Selisih thd RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.996.870,2	3.005.127,7	8.257,5
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.996.289,2	3.004.546,6	8.257,5
1. Penerimaan Perpajakan	2.490.911,6	2.490.911,6	0,0
- Penerimaan Pajak	2.189.307,2	2.189.307,2	0,0
- Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	301.604,4	301.604,4	0,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	505.377,6	513.635,1	8.257,5
a. Pendapatan SDA	217.964,2	217.964,2	0,0
b. Pend. dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	85.997,9	90.000,0	4.002,1
c. PNEP Lainnya	123.486,1	127.741,4	4.255,3
d. Pendapatan BLU	77.929,5	77.929,5	0,0
II. PENERIMAAN HIBAH	581,1	581,1	0,0
B. BELANJA NEGARA	3.613.056,3	3.621.313,7	8.257,5
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	2.693.184,2	2.701.441,6	8.257,5
1. Belanja K/L	976.788,0	1.160.085,0	183.297,0
2. Belanja non-K/L	1.716.396,2	1.541.356,6	(175.039,6)
a.l.: a. Pembayaran Bunga Utang	552.854,3	552.854,3	0,0
b. Subsidi	309.052,1	307.931,9	(1.120,2)
1) Subsidi Energi	204.532,4	203.412,2	(1.120,2)
2) Subsidi Non Energi	104.519,7	104.519,7	0,0
c. Kompensasi BBM dan Listrik	189.797,5	190.917,7	1.120,2
d. Cadangan Anggaran Pendidikan	107.862,2	35.422,2	(72.439,9)
II. TRANSFER KE DAERAH	919.872,1	919.872,1	0,0
Total Anggaran Pendidikan	722.611,3	724.262,7	1.651,5
Rasio Anggaran Pendidikan Total (%)	20,0	20,0	(0,0)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(63.331,8)	(63.331,8)	0,0
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(616.186,1)	(616.186,1)	0,0
%Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,53)	(2,53)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	616.186,1	616.186,1	0,0

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada kesempatan ini, kami hanya menyampaikan beberapa pendapat dan catatan dari pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir fraksi terhadap RUU APBN TA 2025 yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, antara lain:

- 1) Fraksi PDI Perjuangan** memberikan beberapa sikap dalam pembahasan APBN TA 2025 antara lain: Pelaksanaan APBN harus memberikan jalan kemakmuran bagi seluruh rakyat, memperhatikan kemajuan disegala bidang dan pencapaian pemertaan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan APBN TA 2025, Pemerintah harus dapat menjaga perekonomian nasional yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inflasi yang terkendali,

meningkatkan investasi dan juga mengantisipasi transmisi tekanan perekonomian global dan domestik.

- 2) **Fraksi Partai Golkar** mengapresiasi besarnya perhatian Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap pengembangan sumber daya manusia dengan dibentuknya Badan Gizi Nasional dan berharap program ini dapat dijalankan dengan tata kelola dan pengawasan yang seksama, agar makanan bergizi ini tidak hanya berdampak positif pada kualitas SDM anak bangsa, namun sekaligus memberikan *multiplier effect* yang optimal bagi pelaku UMKM serta perekonomian nasional secara umum.
- 3) **Fraksi Partai Gerindra** bersepakat dengan Pemerintah ke depan harus fokus pada kekuatan ekonomi domestik. Permintaan domestik diharapkan agar lebih kuat dan stabil sekaligus mendorong akselerasi transformasi dan penguatan fondasi ekonomi nasional, yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra mendukung Pemerintah untuk, antara lain: menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan pendapatan masyarakat; menciptakan lapangan kerja; memperkuat dan memperluas hilirisasi; mempertajam kebijakan pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi; dan mempercepat transformasi untuk produktivitas, daya saing, dan penguatan industri strategis nasional.
- 4) **Fraksi Partai NasDem** memandang bahwa target pertumbuhan akan cukup menantang. Dukungan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat sangat penting karena konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB). Apabila konsumsi rumah tangga tetap tumbuh solid di kisaran 5% atau lebih, maka target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mewaspadaikan inflasi terutama dari kenaikan harga komoditas pangan.
- 5) **Fraksi PKB** memandang kebijakan fiskal tahun 2025 yang bertema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" harus dikawal dan dipastikan telah direncanakan dan disusun dengan misi menegakan keadilan untuk kemaslahatan rakyat (*tahqiqul 'adli li islahi ar-ra'iyah*). Pemerintah baru sebagai pengguna dan pelaksana APBN 2025 nanti dituntut bisa mempercepat Pembangunan yang sehat dan terus berkelanjutan ditengah berbagai tantangan dari dalam dan luar negeri yang datang silih berganti.
- 6) **Fraksi Partai Demokrat** memberikan beberapa catatan hasil pembahasan di Badan Anggaran, antara lain: Fraksi Demokrat menilai bahwa target pertumbuhan 5,2 persen dan Tingkat inflasi 2,5 persen merupakan pondasi awal bagi pemerintahan baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi ditahun berikutnya dengan stabilitas harga yang terus terjaga.
- 7) **Fraksi PKS** menerima dengan catatan (*Minderheit Nota*), memberikan 37 (tiga puluh) catatan antara lain: Pemerintah perlu bekerja keras untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2 persen. Hal ini penting karena menjadi pijakan awal pemerintahan baru, selain urgensi sebagai mencapai target pertumbuhan bukan hanya diarahkan berkontribusi terhadap penurunan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapat tetapi juga mendasi fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia.
- 8) **Fraksi PAN** menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi yang ketat setiap program dan pengalokasian anggaran agar dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan yang dinamis.

Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, APBN 2025 harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan nasional. Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah agar seluruh masukan dan catatan yang diberikan menjadi perhatian yang dapat ditindaklanjuti secara serius.

- 9) **Fraksi PPP** meminta agar Pemerintah memastikan kebijakan-kebijakan yang bersumber dari APBN itu lebih berpihak pada kualitas daripada pertumbuhannya. Idealnya pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dari aspek Tingkat kemiskinan dan Tingkat pengangguran.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Berikut kami laporkan Sikap Fraksi atas RUU APBN TA 2025 yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, yaitu:

1. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyetujui atau menerima RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.
2. Fraksi PKS menerima dengan catatan (*minderheids nota*) atas RUU APBN TA 2025 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

Pimpinan Dewan, Para Anggota dan hadirin yang berbahagia,

Tidak terasa telah 5 tahun kita berkhidmad kepada rakyat, selama itu Badan Anggaran DPR bekerja sama dengan pemerintah, bahu membahu, menghadapi naik turunnya perekonomian nasional, namun Alhamdulillah situasi itu bisa kita lalui bersama. Siapa sangka, di tahun kedua masa kerja, kita menghadapi pandemi covid19. Keadaan sulit yang dihadapi oleh banyak negara.

Kerjasama, kolaborasi, dan saling memberi kepercayaan antara Badan Anggaran dan pemerintah menjadi kunci penting menghadapi perekonomian sulit di masa pandemi. Karena gotong royong, dan berbagi peran, kita malah bisa pulih lebih cepat dari pandemi, dan lebih kuat dibandingkan dengan negara negara lain.

Saat pandemi baru usai, kita kembali dihadapkan persoalan baru. The Fed dan bank sentral negara negara maju secara agresif menaikkan kebijakan suku bunga secara beruntun. Langkah ini mereka tempuh untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini sebagai respon atas konflik geopolitik dimulai pecah perang Rusia dan Ukraina.

Sekali lagi, dengan modal kekompakan, dan saling percaya, Badan Anggaran DPR dan pemerintah bisa melalui keadaan tidak mudah itu, dan membalikinya menjadi peluang baru. Hasilnya, setelah 12 tahun penerimaan perpajakan mengalami shortfall, dan neraca perdagangan yang selalu minus, kita berhasil membalikkan keadaan. Pada tahun 2022 penerimaan perpajakan melampaui target, dan mempertahankan surplus neraca perdagangan hingga kini.

Di penghujung masa tugas ini, Badan Anggaran DPR bersama Saudari Menteri Keuangan, Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia telah berkomitmen menjembatani masa transisi pemerintahan ini dengan baik. Oleh

sebab itu, proses penyusunan RAPBN 2025 ini semaksimal mungkin kita sesuaikan dengan arah kebijakan Presiden terpilih.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan bait puisi Sastrawan Khalil Gibran, sebagai tanda mata kami kepada Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, dan juga kepada pemerintah yang di wakili oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur Bank Indonesia;

“Ada hal-hal yang tidak ingin kita lepaskan, orang-orang yang tidak ingin kita tinggalkan, tapi ingatlah melepaskan bukan akhir dari dunia melainkan awal suatu kehidupan baru.

Ketika tiba saat perpisahan, janganlah kalian berduka, sebab apa yang paling kalian kasihi darinya mungkin akan nampak lebih nyata dari kajauha, seperti gunung yang nampak lebih agung terlihat dari padang dan dataran.

Tuhan telah memasang suluh dalam hati kita yang menyinarkan pengetahuan dan keindahan, berdosalah mereka yang mematikan suluh itu, karena itu mari kita jaga suluh itu selamanya”.

Mengakhiri Laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, kami selanjutnya menyerahkan kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, untuk mendapatkan persetujuan

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR, tiada kata yang patut kami ucapkan selain terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Gubernur Bank Indonesia berserta jajaran, Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi I s.d Komisi XI, dan Pimpinan Fraksi atas kerjasamanya dalam pembahasan RUU APBN TA 2025.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada media massa yang telah menyebarkan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat, dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga akhirnya seelsai. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, kami mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan kepada Ibu/Bapak anggota dewan yang terhormat.

**Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

BADAN ANGGARAN DPR RI,

KETUA

MH.SAIB ABDULLAH

A-224